

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah menghadirkan perubahan mendasar dalam tata kelola keuangan publik, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas (Reza et al., 2024). Transformasi sistem pemerintahan ini telah mendorong peningkatan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Heriyanto, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Arip, (2021) mengungkapkan bahwa tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik semakin meningkat, yang mengharuskan pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi landasan penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik di era reformasi (Hidayat et al., 2023).

Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan kebijakan public (Dito, 2018). Helti et al., (2024) desentralisasi telah menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan pendekatan manajerial yang lebih efektif. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas kinerja manajerial para pejabat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan mengelola sumber daya daerah (Rika, 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas kinerja manajerial dalam konteks otonomi daerah.

Kinerja manajerial dalam konteks pemerintahan merupakan elemen krusial dalam mencapai tujuan organisasi public (Ainul & Titik, 2018). Menurut Almira & Letje, (2020) kinerja manajerial didefinisikan sebagai tingkat efektivitas dan efisiensi yang dicapai oleh para manajer dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kinerja manajerial yang optimal dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemahaman tentang konsep kinerja manajerial ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem manajemen kinerja di sektor publik (Arifin & Sukmawati, 2021).

Dalam konteks yang lebih spesifik, kinerja manajerial mengacu pada kemampuan pejabat pemerintah dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif (Hasibuan, 2019). Mushtaq, (2023) menjelaskan bahwa kinerja manajerial mencakup kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, (Mohamed & Nek, 2020) menekankan bahwa kinerja manajerial yang baik tercermin dari kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan organisasi, termasuk aspek keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Hal ini menunjukkan kompleksitas tanggung jawab manajerial dalam organisasi pemerintah.

Implementasi kinerja manajerial yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan daerah memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan public (Fransiscus et al., 2019). Kinerja manajerial yang baik dapat menghasilkan efisiensi

dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi (Rezky et al., 2022). Hal ini didukung oleh penelitian Almira & Letje, 2020) yang menemukan bahwa proses penyusunan dan implementasi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di sektor publik. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi (Denardo & Sudarwan, 2019).

Dalam upaya meningkatkan kinerja manajerial, terdapat beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan. Iqbal, 2018) partisipasi anggaran, pengendalian internal, dan *job relevant information* merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Cecilia, (2017) mengungkapkan bahwa integrasi ketiga faktor tersebut dapat menciptakan sistem manajemen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang peran masing-masing faktor dalam meningkatkan kinerja manajerial.

Partisipasi aktif dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola yang baik (Khosyi et al., 2024). Menurut Hafiez et al., (2020) keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penganggaran dapat meningkatkan akurasi alokasi sumber daya dan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini diperkuat oleh temuan Heri et al., (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran yang efektif dapat meningkatkan komitmen organisasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik.

Ketersediaan *job relevant information* memainkan peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan (Chong, 2004). Menurut (Hadi & Iqbal, 2020) akses terhadap informasi yang relevan dan akurat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial dalam konteks yang kompleks. Penelitian Widayanti et al. (2024) lebih lanjut mengungkapkan bahwa *job relevant information* berperan sebagai katalisator dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung kinerja manajerial.

Sistem pengendalian internal memegang peranan vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan pemerintahan (Jannah & Rahayu, 2015). Pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan keselarasan antara implementasi kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Handayani & Andini, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan et al., (2024) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan mendorong pencapaian prinsip-prinsip good governance. Integrasi sistem pengendalian internal dalam manajemen pemerintahan menjadi kunci dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara partisipasi anggaran, *job relevant information*, dan kinerja manajerial di sektor publik. Hasil studi yang dilakukan oleh Mushtaq & Zaidi (2023) menemukan bahwa JRI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, dimana pengaruh ini semakin diperkuat dengan adanya sistem pengendalian internal yang

efektif. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Marisa (2024) yang mengonfirmasi peran pengendalian internal sebagai moderator positif dalam hubungan antara JRI dan kinerja manajerial. Dalam konteks yang lebih luas, Tambunan et al. (2024) menjelaskan bahwa JRI berperan penting dalam membantu manajer memahami berbagai alternatif keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, sistem pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa informasi tersebut dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Penelitian Azizah et al. (2022) memberikan perspektif baru dengan mengkaji peran pengendalian internal dalam era digitalisasi JRI. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang terintegrasi dengan sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas JRI dalam mendorong peningkatan kinerja manajerial di era digital.

Dewi (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa JRI merupakan informasi yang sangat penting dalam konteks tugas manajerial, karena memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan efisien dalam lingkungan kerja yang kompleks. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dalam penyusunan anggaran dan kejelasan tujuan anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial. Mehta dan Nuryatno (2021) menambahkan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat menjamin kualitas informasi yang diterima, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bagus dan Pratama (2021) yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki korelasi langsung

dengan kinerja manajerial, terutama ketika JRI berperan sebagai variabel moderasi. Fazarila (2022) menekankan pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang diintegrasikan dengan partisipasi anggaran dan JRI untuk meningkatkan kualitas kinerja manajerial, khususnya dalam konteks pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran pengendalian internal dalam memperkuat hubungan antara JRI dan kinerja manajerial.

Dalam konteks pemerintah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah memerlukan kajian komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial (Agus, 2019). Evaluasi terhadap pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* menjadi krusial dalam optimalisasi kinerja manajerial (Dimas, 2024). Pentingnya peran moderasi sistem pengendalian internal dalam memperkuat hubungan antar variabel tersebut. Pemahaman mendalam tentang dinamika ini diperlukan untuk pengembangan strategi peningkatan kinerja yang efektif (Siswo Nugroho et al., 2021).

Dalam implementasinya, partisipasi anggaran di Pemerintah Kota Sungai Penuh menghadapi berbagai tantangan operasional, adanya kesenjangan koordinasi antar unit kerja dalam proses penyusunan anggaran. Berdasarkan laporan hasil analisis jabatan inspektorat kota sungai penuh tahun 2023, terkait permasalahan kinerja manajerial, partisipasi anggaran, *job relevant information*, dan pengendalian internal, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2023

Indikator	Target 2023 (%)	Capaian 2023 (%)
Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	100	100

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	86,92
Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	100	86,92
Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100	100

Sumber: RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2023.

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan capaian kinerja dan pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada aspek kinerja manajerial, meskipun ketercapaian perencanaan dan penganggaran telah mencapai target optimal 100%, namun ketersediaan laporan capaian kinerja masih berada di bawah target dengan pencapaian 86,92%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 13,08% dalam dokumentasi kinerja yang perlu diperbaiki. Selain itu, tingkat partisipasi aparatur dalam pengembangan kompetensi juga belum optimal dengan capaian yang sama yaitu 86,92%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun target administrasi keuangan dan evaluasi kinerja telah tercapai 100%, ketersediaan laporan capaian kinerja dan partisipasi aparatur dalam pelatihan masih di bawah target, yang dapat mengindikasikan tantangan dalam partisipasi anggaran dan *job relevant information*.

Tabel 1.2. Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi di Kota Sungai Penuh Tahun 2023

Indikator	Capaian 2023 (%)
Kinerja pengawasan internal pada OPD, Pemdes, Sekolah, Puskesmas, dll.	99,70
Audit Kinerja, Audit Kepatuhan, Evaluasi AKIP	95,71
Kinerja Organisasi dalam Reformasi Birokrasi	5,11
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	7,76

Sumber: RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pengawasan internal dan reformasi birokrasi, terdapat temuan yang memprihatinkan dimana skor reformasi birokrasi sangat rendah yaitu hanya 5,11%, dan indeks pemerintahan

bersih dan bebas KKN juga masih rendah pada angka 7,76%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja pengawasan yang mencapai 99,70% dengan implementasi reformasi di lapangan. Namun demikian, terdapat capaian positif dimana kinerja pengawasan internal dan audit kinerja serta evaluasi AKIP telah mencapai angka yang cukup baik yaitu 95,71%.

Tabel 1.3. *Job relevant information* di Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2023

Indikator	Target 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Keterangan
Persentase aparatur yang mengikuti diklat, sosialisasi, dan bimtek	100	86,92	Masih di bawah target, menunjukkan belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan dan prosedur kerja.
Persentase ketercapaian laporan capaian kinerja OPD	100	86,92	Rendahnya ketercapaian laporan kinerja dapat mengindikasikan kurangnya informasi yang tersedia bagi manajer dalam pengambilan keputusan.
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Target tercapai, menunjukkan bahwa informasi terkait perencanaan tersedia.
Jumlah dokumen RKA-OPD yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	Dokumen perencanaan anggaran tersedia, namun pemanfaatannya dalam manajemen masih perlu dianalisis.
Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	Data tersedia, tetapi implementasi dalam perbaikan kinerja perlu evaluasi lebih lanjut.

Sumber: RKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada aspek *Job relevant information*, data menunjukkan beberapa kelemahan seperti rendahnya partisipasi dalam diklat dan sosialisasi yang hanya mencapai 86,92%, serta ketercapaian laporan kinerja OPD yang juga belum optimal dengan persentase yang sama. Kesenjangan sebesar 13,08% dalam penyerapan informasi dan pelaporan mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem informasi manajemen. Meskipun demikian, terdapat beberapa pencapaian positif dimana seluruh dokumen perencanaan, RKA-OPD, dan laporan capaian kinerja OPD telah tersusun sesuai target yang ditetapkan yaitu 7 dokumen.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitas beberapa target telah tercapai, masih terdapat permasalahan dalam aspek kualitas implementasi dan efektivitas sistem yang ada. Hal ini menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian ini,

Berdasarkan laporan hasil analisis jabatan Inspektorat Kota Sungai Penuh tahun 2023 ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian target kinerja di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terutama dalam hal perencanaan dan pengawasan program kerja. Dari sisi partisipasi anggaran, laporan menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat struktural dalam proses penyusunan anggaran masih belum optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya sinkronisasi antara perencanaan program dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Terkait *job relevant information*, ditemukan bahwa distribusi informasi antar unit kerja belum berjalan efektif, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam hal pengendalian internal, laporan mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Beberapa temuan menunjukkan bahwa dokumentasi pelaksanaan program kerja belum terstandarisasi dengan baik, serta masih terdapat tumpang tindih dalam pembagian tugas dan wewenang antar bidang.

Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Namun, dinamika politik lokal dan perubahan regulasi pemerintah pusat menciptakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menghadirkan beberapa kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan

dan mengembangkan model terintegrasi yang menghubungkan partisipasi anggaran dan *job relevant information* dengan kinerja manajerial, dengan mempertimbangkan peran moderasi pengendalian internal dalam konteks pemerintahan daerah. Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pengelolaan kinerja manajerial di Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah otonom yang sedang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan penelitian mendalam tentang pengaruh partisipasi anggaran dan *job relevant information* terhadap kinerja manajerial dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan fenomena di atas dan adanya penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut pada pemerintah Kota Sungai Penuh dalam bentuk thesis dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Job Relevan Information Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh?

2. Bagaimana pengaruh *Job relevant information* terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh?
3. Apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh?
4. Apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh *Job relevant information* terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2. Menganalisis pengaruh *Job relevant information* terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Menguji peran pengendalian internal dalam memperkuat hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
4. Menguji peran pengendalian internal dalam memperkuat hubungan antara *Job relevant information* dan kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi manajemen sektor publik, khususnya terkait hubungan antara partisipasi anggaran, *Job relevant information*, pengendalian internal, dan kinerja manajerial.

2. Memperkaya literatur tentang peran moderasi pengendalian internal dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
- 2 Menyediakan bukti empiris tentang aplikasi teori kontingensi dalam manajemen kinerja sektor publik.

2.4.1 Manfaat Praktis:

1. Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi anggaran dan pemanfaatan *Job relevant information*. Menyediakan dasar untuk penyempurnaan sistem pengendalian internal guna meningkatkan kinerja manajerial.
2. Bagi Pembuat Kebijakan: Menyediakan informasi untuk pengembangan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur sipil negara. Memberikan masukan untuk penyusunan program pengembangan kapasitas pejabat pemerintah daerah.
3. Bagi Praktisi dan Konsultan Manajemen Publik: Menyediakan referensi untuk merancang intervensi organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja manajerial di pemerintahan daerah. Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja sektor publik.
4. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pejabat pemerintah daerah. Mendorong partisipasi masyarakat yang lebih terinformasi dalam proses pengawasan kinerja pemerintah daerah.

1.5 Kebaharuan dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kinerja manajerial yang diukur terbatas pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Partisipasi anggaran yang diteliti mencakup keterlibatan dalam penyusunan dan penetapan anggaran tahunan. *Job relevant information* yang dikaji meliputi ketersediaan dan aksesibilitas informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan manajerial. Pengendalian internal yang diteliti mengacu pada komponen-komponen dalam kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan menganalisis fenomena tersebut secara komprehensif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan kinerja manajerial di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Melalui analisis yang mendalam terhadap pengaruh partisipasi anggaran, ketersediaan informasi yang relevan dengan pekerjaan, serta efektivitas pengendalian internal, penelitian ini berharap dapat menghasilkan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kinerja manajerial di lingkungan pemerintah daerah.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji tentang partisipasi anggaran, *job relevant information*, dan pengendalian internal dalam konteks pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh Denardo & Sudarwan (2019), Hafiez et al. (2020), dan Iriany & Sabra (2020), masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu

seperti Mushtaq (2023), Ernawaty et al. (2022), dan Heri et al. (2021) cenderung meneliti variabel-variabel tersebut secara terpisah, belum mengintegrasikan ketiga aspek (partisipasi anggaran, JRI, dan pengendalian internal) dalam satu model penelitian yang komprehensif. Kedua, penelitian Vinícius & Juliana (2020), Y. A. Mushtaq et al. (2023), dan Paulus et al. (2018) lebih berfokus pada sektor swasta, sementara penelitian di sektor pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, masih terbatas. Ketiga, studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Laras et al. (2020), Rezky et al. (2022), dan Hendrik et al. (2020) belum secara spesifik mengkaji peran pengendalian internal sebagai variabel moderasi dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan ketiga aspek dalam satu model penelitian, dengan fokus pada Pemerintah Kota Sungai Penuh, sekaligus mengkaji peran moderasi pengendalian internal dalam hubungan antara partisipasi anggaran dan JRI terhadap kinerja manajerial.

Selanjutnya penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Denardo & Sudarwan, 2019; Hafiez et al., 2020; Iriany & Sabra, 2020; Mushtaq, 2023; Ernawaty et al., 2022; Heri et al., 2021; Vinícius & Juliana, 2020; Y. A. Mushtaq et al., 2023; Paulus et al., 2018; Iriany & Sabra, 2020; Laras et al., 2020; Rezky et al., 2022; Hendrik et al., 2020) tentang partisipasi anggaran, ketersediaan informasi, dan pengendalian internal dalam konteks pemerintahan, namun masih ada kesenjangan penelitian yang belum mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari tiga variabel penting, yaitu partisipasi anggaran, ketersediaan informasi yang relevan dengan pekerjaan, dan efektivitas sistem pengendalian internal, terhadap kinerja manajerial di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja manajerial pada konteks pemerintahan daerah di Kota Sungai Penuh.

Kebaharuan dan orisinalitas penelitian ini terletak pada integrasi dan pengembangan lebih lanjut dari tiga studi terdahulu, dengan fokus khusus pada konteks Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kebaharuan lainnya terletak pada konteks temporal dan geografis yang spesifik. Dilakukan beberapa tahun setelah studi-studi sebelumnya, penelitian ini dapat menangkap perubahan dan perkembangan terbaru dalam praktik manajemen publik di era good governance. Fokus pada Kota Sungai Penuh memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana faktor-faktor unik kota (seperti status kota baru, dinamika politik lokal, dan tantangan geografis) mempengaruhi variabel-variabel yang diteliti.

Metodologi penelitian ini juga berpotensi menggunakan teknik analisis data yang lebih mutakhir, memberikan sudut pandang analitis yang baru dan mungkin lebih akurat. Integrasi teori-teori terbaru dalam manajemen publik dan akuntansi sektor publik juga dapat memberikan kerangka konseptual yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi saat ini.

Penelitian ini penting dilakukan lebih lanjut karena dapat memberikan kontribusi signifikan pada literatur manajemen publik dan akuntansi sektor publik,

khususnya dalam konteks pemerintahan kota di Indonesia. Hasil penelitian berpotensi memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas dan perkembangan Sungai Penuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis mengadopsi sistematika penulisan yang terorganisir dalam lima bab, yaitu

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang penelitian yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan, serta permasalahan yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan dijabarkan secara rinci. Tujuan dari penelitian ini juga akan dijelaskan untuk memberikan gambaran jelas mengenai pencapaian yang ingin diraih.

BAB II: TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menyajikan kajian teoritis yang mendasari penelitian, yang meliputi teori-teori relevan serta pengembangan hipotesis penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan, yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan, serta metode yang diterapkan dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti akan menguraikan populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian, serta jenis data yang digunakan, diikuti dengan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji

hipotesis, termasuk analisis data deskriptif, pengujian instrumen, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data yang telah dilakukan. Hasil-hasil yang diperoleh akan dibahas secara mendalam dan dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan merangkum temuan utama dari penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini menyajikan seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yang meliputi buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian lampiran berisi dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti instrumen penelitian, data mentah, atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian